



JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI

PEMUKIMAN PENDUDUK PERKOTAAN

Gurniwan Kamil Pasya

Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

email: gurniwan_kamil@yahoo.com

ABSTRAK

Pertambahan penduduk kota-kota besar di Indonesia di antaranya dengan banyak pendatang sebagai migran, mereka ini menjadi kekhawatiran pemerintah kota apabila tanpa memiliki keahlian, keterampilan, dan dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Para migran datang ke perkotaan telah ada sejak jaman kolonial Belanda tetapi akan tampak jelas di saat-saat kemerdekaan, mereka ini menempati wilayah-wilayah kosong sebagai pemukiman spontan atau pemukiman liar, yang lambat laun menjadi kumuh. Walaupun demikian, adapula yang tidak beruntung mendapatkan pemukiman karena berbagai hal yang akhirnya tidur di mana saja tanpa adanya usaha yang nyata untuk mendapatkan tempat tinggal. Pemukiman padat penduduk menjadi kumuh dengan segala permasalahannya memerlukan adanya perbaikan melalui perbaikan kampungsehingga menjadi tempat tinggal yang sehat sesuai dengan pendekatan manusiawi yang dilakukan pemerintah kota. Sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pemukiman kumuh di perkotaan, melalui dibangunnya rumah susun bagi penduduk miskin di atas tanah negara yang sebelumnya dijadikan tempat tinggal mereka.

Kata kunci : pemukiman, urbanisasi, perkotaan.

PENDAHULUAN

Kota-kota besardi Indonesia tumbuh dan berkembang tidak hanya oleh penduduk kota itu sendiri, melainkan banyak juga pendatang yang turut membangun kota. Seiring dengan tumbuhnya kota, maka akan tumbuh pula penduduknya, yang memerlukan tempat tinggal, terutama yang dekat dengan tempat kerja. Tempat tinggal penduduk kota besar ini kadangkala tidak sesuai dengan pertumbuhan kota itu sendiri, pemukiman tertinggal perkembangannya sebagai akibat kemampuan penduduk kota yang tidak sama. Akhirnya terdapat pemukiman yang padat penduduknya dengan kondisi jalan yang sempit, rumah-rumah yang berdempetan, sanitasi yang tidak lancar, bahkan rawan terhadap musibah kebakaran atau bencana lain yang dapat merugikan penduduk itu sendiri.

Suatu hal tidak dapat dipungkiri bahwa tumbuhnya suatu kota besar sedikit banyak oleh adanya pendatang yang berasal dari kota-kota lain ataupun dari wilayah pedesaan yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Tumbuhnya kota di antaranya sebagai usaha untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum bagi penduduk kota itu sendiri. Fasilitas umum muncul karena adanya kebutuhan penduduk kota, dengan demikian bahwa fasilitas umum tidak muncul sebelum penduduk itu ada, melainkan fasilitas umum muncul karena adanya penduduk yang memerlukan. Kembali pada pemikiran 'urbanisasi', yaitu bahwa mereka datang ke suatu kota dengan tujuan

untuk mencari kerja dan menetap menjadi penduduk kota. Hanya saja untuk menetap menjadi penduduk kota pada mulanya menempati wilayah-wilayah yang beragam, mulai tempat tinggal yang dianggap memadai sampai pada tempat tinggal ala kadarnya sebagai tempat tinggal sementara. Bahkan mereka yang datang ke suatu kota tidak mendapatkan keberhasilan yang merata, ada yang berhasil sampai mencapai kelas sosial tertinggi di masyarakat, atau mendapatkan kelas sosial yang paling bawah, kasarnya dapat disebut sebagai gelandangan. Perbedaan keberhasilan seperti ini banyak tergantung pada diri pribadi orang yang menjadi penduduk kota itu sendiri, untuk menjadi orang yang terbaik, karena keberhasilan tidak dicapai dengan mudah melainkan melalui perjuangan yang keras.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa pemukiman penduduk muncul untuk mendekati tempat kerja, yang lama kelamaan banyak orang berdatangan ke tempat yang sama mendirikan tempat tinggal, akhirnya berkembang menjadi pemukiman padat tanpa perencanaan yang jelas. Walaupun demikian, tidak selamanya pemukiman seperti ini dihuni oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah, bahkan adapula yang berpenghasilan memadai, sehingga akan tampak perbedaan yang mencolok antara mereka yang berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi di wilayah padat yang sama. Keadaan seperti ini perlu sekali dilakukan penataan pemukiman melalui perbaikan kampung, ataupun cara lain yang tidak memunculkan istilah pemukiman kumuh.

Bagaimanapun juga penduduk perkotaan sebagai penduduk sah yang dibuktikan dengan adanya pemilikan 'Kartu Tanda Penduduk' dengan tempat tinggal yang berbeda-beda baik wilayah, ataupun kondisinya. Hanya saja, keberuntungan dan usaha yang berbeda-beda menyebabkan penduduk kota memiliki pekerjaan yang berbeda pula, begitu pula halnya pendapatan yang diterima akan berbeda pula, karena berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Akhirnya penduduk kota sebagai penduduk yang sangat heterogen dan sangat kompleks, memerlukan penanganan yang sangat kompleks untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah kota, terutama dalam hal menyediakan tempat tinggal yang memadai seperti adanya pembangunan perumahan dengan berbagai type ataupun pembangunan rumah susun bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Penyediaan pemukiman seperti ini, tidak semudah di tahun 1970-an yaitu mulai digulirkannya 'Perumnas' dengan lahan-lahan kosong masih banyak tersedia di perkotaan maupun di pinggiran kota, tetapi di tahun awal abad 21 seperti sekarang ini menjadi sangat sulit, yang pasti tentunya dengan harga tanah yang sangat mahal dan dapat berakibat mahal pula pada pemilikan rumah tersebut.

DAYA TARIK KOTA

Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa urbanisasi adalah 'tumbuhnya suatu kota akibat banyaknya pendatang' atau 'berpindahnya penduduk untuk mencari kerja dan menetap di kota' pengertian seperti ini apabila dilihat dari sudut kota itu sendiri sebagai daya tarik perkotaan bagi penduduk kota lain ataupun dari pedesaan. Seperti yang dikemukakan Bintarto (1984 : 21) sebagai berikut,

Ditinjau dari konsep keruangan (spatial) dan ekologis, urbanisasi merupakan gejala geografis. Pertama, karena adanya gerakan/perpindahan penduduk dalam satu wilayah atau perpindahan ke luar wilayahnya. Kedua, gerakan/perpindahan penduduk terjadi disebabkan salah satu komponen dari ekosistemnya kurang/tidak berfungsi secara baik,

sehingga terjadi ketimpangan dalam ekosistem setempat. Ketiga, terjadinya adaptasi ekologis yang baru bagi penduduk yang pindah dari daerah ke daerah baru, dalam hal ini kota.

Urbanisasi terjadi akibat adanya ketimpangan wilayah dalam hal pembangunan, lapangan kerja, ataupun pendapatan yang jauh berbeda. Yang menjadi masalah bagi penduduk yang berpindah ke perkotaan adalah mereka yang berasal dari pedesaan, hanya mengandalkan kemauan dengan melihat daya tarik yang sangat menggiurkan walaupun dengan latar belakang pendidikan rendah, tanpa keahlian ataupun tanpa keahlian yang memadai, sehingga sangat mungkin mereka ini menjadi bagian dari kelas bawah di perkotaan. Sebagaimana Suparlan (dalam Widiyanto, 1984 : 47) kemukakan,

Para warga desa yang datang ke kota karena desakan ekonomi pada umumnya adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di desanya. Mereka biasanya bukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan/keterampilan yang digunakan untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan dalam struktur-struktur formal yang ada, yang dapat menghasilkan pendapatan yang baik untuk hidup yang layak.

Dengan demikian, mereka ini termasuk orang-orang yang tidak mengandalkan atau melakukan perhitungan secara matang, yang akibatnya dapat fatal bagi kehidupan mereka. Harapan sebenarnya yang mereka inginkan adalah mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya sewaktu ada di pedesaan, karena suatu hal mereka harus mengadu nasib ke perkotaan untuk menjadi pekerja seperti menjadi buruh industri atau berusaha di sektor informal. Dalam hal ini Temple (dalam Kuntjoro-Jakti, 1986 : 84) mengemukakan,

Sebab-sebab utama meninggalkan pedesaan berhubung susahny mendapat pekerjaan di wilayah pedesaan.... Daya tarik tradisional, seperti misalnya kemungkinan mendapat pekerjaan dengan upah lebih tinggi, kehidupan kota yang penuh gairah, kesempatan pendidikan yang baru, dan sebagainya, kelihatan tidak begitu penting. ... dipilih karena para migran merasa bahwa kota inilah yang memberi harapan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan.

Para migran yang datang ke kota tidak selamanya menjadi kelas bawah, karena keuletan, kemauan yang keras, dan faktor keberuntungan yang akhirnya dapat mengantarkan mereka ke kelas sosial yang lebih baik. Karena itu, untuk datang ke suatu kota perlu dibekali dengan latar belakang pendidikan memadai yang diperlukan kota, keterampilan dan keahlian sebagai bekal hidup dan usaha di kota, sehingga mereka inilah yang mengisi berbagai segi kehidupan kota.

Penduduk kota sebagian besar sebenarnya berasal dari pendatang, yang sudah beberapa generasi secara bergelombang untuk menjadi penduduk kota, bahkan dapat saja seorang penduduk kota memiliki leluhur dari wilayah lain. Hal ini akan tampak pada saat Hari Raya Iedul Fitri, kota akan sangat lengang, karena ditinggal penduduknya yang kembali ke daerah asal, mereka akan datang lagi setelah perayaan Iedul Fitri selesai. Kembalinya penduduk untuk menjalani kehidupan kota seperti hari-hari sebelumnya, yang dikhawatirkan oleh pemerintah kota adalah banyaknya penduduk pendatang yang baru (migran) yang akan menambah beban kota.

PENDUDUK KOTA TANPA TEMPAT TINGGAL

Para migran yang datang ke perkotaan tidak semuanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, bahkan tanpa tempat tinggal sama sekali. Mereka seperti ini

dapat dikatakan se bagai orang-orang yang kurang beruntung, akibatnya menjadi gelandangan. Kenapa mereka demikian ? menjadi gelandangan bukanlah suatu keinginan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor seperti dikemukakan Alkostar (dalam Widiyanto, 1984 : 120-121) yaitu,

Faktor interen meliputi : sifat malas, tidak mau bekerja; mental yang tidak kuat; adanya cacat-cacat fisik; adanya cacat-cacat psikis (jiwa). Sedangkan faktor eksteren terdiri dari faktor ekonomi, geografi, sosial, pendidikan, psikologis, kultural, lingkungan, dan agama. 1) Faktor ekonomi : kurangnya lapangan pekerjaan; kemiskinan, akibat rendahnya pendapatan perkapita; dan tidak mencukupi kebutuhan hidup; 2) Faktor geografi: daerah asal yang minus dan tandus, sehingga tidak memungkinkan mengolah tanahnya; 3) Faktor sosial : arus urbanisasi yang semakin meningkat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; 4) Faktor pendidikan : relatif rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup yang layak; kurangnya pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat; 5) Faktor psikologis : adanya perpecahan/keretakan dalam keluarga, dan keinginan melupakan pengalaman/kejadian masa lampau yang menyedihkan, serta kurangnya gairah kerja; 6) Faktor kultural : pasrah kepada nasib; dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental; 7) Faktor lingkungan : khususnya pada gelandangan yang sudah berkeluarga atau mempunyai anak, secara tidak langsung sudah tampak adanya pembibitan gelandangan; 8) Faktor agama : kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak tahan menghadapi cobaan dan tidak mau berusaha.

Mereka sebagai migran yang datang ke kota mungkin saja tidak bercita-cita menjadi gelandangan, tetapi karena faktor-faktor tersebut menyebabkan mereka memiliki nasib seperti itu. Menjadi gelandangan tidak saja berasal dari migran ke kota, adakalanya leluhur mereka memang gelandangan yang diturunkan setiap generasi, yang tampak di kota pada beberapa persilangan jalan banyak dijumpai anak-anak jalanan yang menjadi peminta-minta, pengamen jalanan, pembersih kaca mobil, dsb. Mereka anak-anak sebagai generasi penerus gelandangan senantiasa diawasi orangtuanya dari kejauhan, yang dengan sengaja dimanfaatkan tanpa harus bekerja keras. Mereka yang menjadi gelandangan tentu saja tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, bahkan di manapun juga mereka dapat beristirahat dan tidur.

Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap di perkotaan tidak hanya gelandangan, seperti : a) para pedagang asongan, akan tidur di gerbong kereta; kursi terminal; pompa bensin, atau tempat-tempat yang dianggapnya dapat digunakan untuk beristirahat; b) pedagang emper toko, kadangkala tidur di dekat dagangannya di emper toko itu sendiri; c) kuli bangunan yang asli sebagai penduduk kota ataupun sebagai pendatang musiman biasanya tidur di bangunan yang sedang dikerjakannya; kolong-kolong jembatan layang dan di emper pertokoan jika tenaga mereka sedang tidak digunakan; d) kuli pasaryang bekerja di pasar pada siang hari akan tidur di kios pasar, di dekat barang; bagi kuli pasar yang bekerja pada malam hari maka tidurnya siang dekat dengan tumpukan barang dagangan; e) tukang becak biasanya tidur di atas becaknya sendiri; f) sopir atau kernet angkutan kota, biasanya tidur di malam hari di pool kendaraan, di bangku terminal, bahkan di dalam angkutan kota itu sendiri, dan lain-lain. Mereka memilih untuk tidak tinggal di rumah atau pemukiman penduduk disebabkan oleh : terbatasnya dana untuk menyewa tempat tinggal atau kamar; tidak memiliki kerabat di kota; menghemat biaya sewa kamar; dsb.

PEMUKIMAN SPONTAN

Pemukiman penduduk spontan/liar pada mulanya sebagai dampak dari urbanisasi, mereka sebagai pendatang akan menempati tanah/lahan kosong yang pemiliknya tidak diketahui, kemudian terjadi pembiaran yang akibatnya lama-kelamaan akan menjadi perumahan yang padat dan tidak terkendali, bahkan pemilikan rumah di lahan tersebut telah berganti-ganti pemilikan. Pemukiman seperti ini disebut pemukiman spontan yang sifatnya liar, bahkan telah permanen dan sulit untuk dilakukan pengusiran oleh pemilik tanah. Pemukiman spontan dapat diketahui melalui beberapa kategori, sebagaimana Gilbert dan Gugler (1996 : 119) sebagai berikut,

- (1) *Sebagian besar pemukimannya dibangun oleh keluarga yang dulu menempati atau sedang menempatinnya;*
- (2) *Pemukiman spontan biasanya mengalami beberapa tingkat ketidaklegaan atau kekurangan lengkapan IMB;*
- (3) *Di saat pemukiman pertama kali dibangun kebanyakan infrastruktur dan pelayanan yang masih minim dan fasilitas pemukiman yang kurang;*
- (4) *Pemukiman tersebut ditempati oleh golongan miskin betapapun terbatasnya.*

Pemukiman spontan seperti ini dianggap sebagai pemukiman liar tanpa ijin dan tanpa perencanaan yang jelas, terus berkembang sampai sekarang, adapun tanah/ lahan yang digunakan biasanya milik pemerintah. Pada mulanya hanya satu atau dua rumah yang berdiri di tanah/lahan tersebut, karena terjadi pembiaran maka akan menjadi pemukiman yang padat, sedangkan pada lahan milik pribadi biasanya pada lahan yang terbatas. Terjadinya pemukiman spontan biasanya pada lahan/tanah seperti berikut: 1) Lahan terbuka yang telah ada semenjak jaman kolonial Belanda, semenjak kemerdekaan pemukiman ini tumbuh sejalan dengan perkembangan kota; 2) Lahan di pinggiran rel kereta milik PT. Kereta Api Indonesia, baik yang masih digunakan ataupun yang sudah ditinggalkan, bahkan di beberapa tempat bagi rel yang sudah tidak digunakan dijadikan gang atau rel berada di bawah rumah penduduk; 3) Tempat tinggal dibangun di sela-sela pembatas bangunan industri dengan pembatas bangunan industri yang lain; 4) Di sela-sela rumah penduduk perkotaan, terutama pada lahan yang sangat sempit; 5) Di tepi jalan atau gang pada mulanya dibuat kios rokok atau barang kebutuhan sederhana penduduk, kemudian menjadi warung akhirnya menjadi tempat tinggal.

Keadaan pemukiman terus berkembang akhirnya sejalan dengan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan tidak lagi dihuni oleh penduduk miskin melainkan juga dihuni oleh penduduk yang secara ekonomi sudah mapan. Pemukiman spontan menjadi pemukiman resmi yang padat dan tidak teratur, yang terbukti dengan adanya: 1) Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi mereka yang bermukim di sana; 2) Pembuatan Akta Kelahiran bagi penduduk yang melahirkan dan memiliki anak; 3) Masuknya jaringan listrik PLN dan beberapa rumah ada yang menggunakan air dari PDAM; 4) Mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Kartu Keluarga Miskin; 5) Pada lahan milik pemerintah diberlakukan sewa lahan untuk tempat tinggal, apabila pemerintah sebagai pemilik lahan memerlukannya, maka penduduk harus menyerahkan lahan tersebut yang tentunya dengan penggantian yang disepakati. Dengan demikian, bahwa pengusiran terhadap mereka yang menempati lahan milik pemerintah tidak begitu saja dapat dilakukan, mengingat telah lamanya tinggal atau telah berganti-ganti pemilikan. Karena itu, apabila lahan yang digunakan

penduduk akan digunakan pemerintah untuk kepentingan lain, maka memerlukan pendekatan yang manusiawi yang sejalan dengan pembangunan itu sendiri.

Berbagai sebutan telah muncul bagi pemukiman padat penduduk, yaitu bagi pemukiman padat penduduk miskin dikenal dengan sebutan 'Kumis' atau 'Kumuh Miskin', sedangkan pemukiman padat penduduk yang dihuni oleh mereka yang relatif disebut 'Kuya' atau 'Kumuh Kaya'. Bagi mereka yang ekonominya telah mapan, tentu saja tidak memiliki garasi untuk menyimpan kendaraan roda 4 miliknya, tentu saja akan disimpan di halaman parkir perkantoran dengan tempat tinggal atau sengaja menyewa tempat penyimpanan kendaraan. Walaupun demikian, bahwa pemukiman kumuh memiliki ciri sebagai berikut : 1) Perumahan yang sangat rapat dan tidak teratur; 2) Jalan-jalan sempit yang tidak dimasuki oleh kendaraan roda 4; 3) Rawan terjadinya kebakaran yang besar sebagai akibat sangat berdekatan antar rumah penduduk; dan 4) Sanitasi lingkungan yang tidak lancar; dan lain-lain

Kondisi pemukiman yang padat dan tidak teratur sebagai ciri kota-kota di negara berkembang yang disebut sebagai kampung di perkotaan, memerlukan penataan kembali agar menjadi lingkungan yang asri dan sehat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui Program Perbaikan Kampung (yang dimulai di Jakarta dari tahun 1969 s.d. 1978) seperti oleh Pemerintah DKI sebagai berikut : 1) Pemenuhan kebutuhan pokok para penghuni kampung dengan menyediakan gang-gang, air minum bersih, jamban umum, perbaikan sarana pembuangan sampah, pembuangan air, sekolah, dan klinik; 2) Pengadaan jenis-jenis jasa guna membantu yang miskin dan mereka yang sudah lama menderita karena kondisi yang tidak sehat; 3) Pemberian sebanyak mungkin kesempatan kepada rakyat, agar dapat mencapai sumber-sumber yang ada; dan 4) Pengerahan potensi penduduk agar mampu berusaha sendiri dan membantu kerjasama masyarakat. Apabila setiap perkotaan melakukan perbaikan kampung di wilayah-wilayah kumuh niscaya penataan perkotaan akan sesuai dengan yang diharapkan.

PEMUKIMAN PENDUDUK MISKIN PERKOTAAN

Penduduk kota yang senantiasa terus bertambah tentu akan memerlukan tempat tinggal, bagi mereka yang secara ekonomi memiliki kemampuan sangat memerlukan tempat tinggal yang layak sesuai dengan perencanaan dan tata lingkungan kota. Hal ini banyak ditawarkan oleh pengembang-pengembang dengan berbagai type dan harga yang bervariasi. Tentu saja semua ini diperuntukan bagi mereka yang mampu baik secara tunai maupun dicicil hingga lunas, tetapi perlu diperhatikan pula kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk yang miskin, bukan berarti memerlukan rumah yang bagus dengan harga mahal, melainkan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau oleh mereka. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Budihardjo (1984 : 57 - 58) sebagai berikut,

Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan perumahan yang sudah ada dinilai kurang manusiawi. Tambahan pula kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas, sulit untuk bisa mengangkat diri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Yang saat ini disebut perumahan murah, sebetulnya tidak betul-betul murah dan tidak menjangkau masyarakat lapisan bawah seperti tukang becak, penjual bakso dan jamu gendongan, bakul atau kuli bangunan. Kalau tokoh kelompok tersebut bertekad membangun, mereka hanya mampu menggunakan bahan lokal seperti bambu, tanah liat, jerami, atau bahan bekas seperti karton, plastik, kaleng. Kenyataan

menunjukkan bahwa bagi kebanyakan rakyat miskin, rumah termasuk dalam daftar prioritas yang rendah setelah lapangan kerja, pangan, sandang, dan kesehatan.

Walaupun demikian, bahwa tempat tinggal bukanlah prioritas utama tetapi tetap saja harus tinggal di rumah untuk menghindari terpaan cuaca yang dapat mengganggu kondisi kesehatan, sehingga perlu disediakan rumah murah untuk kaum miskin.

Perumahan bagi kaum miskin di perkotaan tidak mudah untuk dilaksanakan, karena adanya kendala yang harus diatasi oleh pemerintah setempat, antara lain : 1) Lahan kosong di perkotaan sudah sulit untuk didapatkan; 2) Membangun Perumnas sulit dilaksanakan mengingat keterbatasan lahan yang ada; 3) Walaupun lahan kosong masih ada pasti harganya sudah sangat mahal; 4) Lahan kosong di pinggiran kota apabila dijadikan perumahan belum tentu akan terisi, karena penghuni untuk menuju tempat kerja memerlukan biaya transportasi yang tidak murah; dan 5) Tempat tinggal penduduk sulit untuk direlokasi, walaupun berada di lahan milik pemerintah karena berbagai alasan. Dari keadaan tersebut tampaknya perlu belajar dari Jakarta yang membangun rumah susun di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dalam bentuk rumah susun milik, dan rumah susun sewa.

Rumahsusun yang dibangun di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, bukan berarti melakukan penggusuran rumah penduduk setempat, melainkan mengganti rumah yang ada menjadi rumah susun di tempat yang sama. Hal ini dilakukan karena pemukiman penduduk telah menempati tanah/lahan milik pemerintah, kemudian sekarang rumah-rumah tersebut karena berada di pemukiman kumuh maka perlu dilakukan perbaikan dan diganti dengan kondisi dan lingkungan yang baru. Perubahan pemukiman kumuh menjadi rumah susun sebagai suatu alternatif yang manusiawi dalam pembangunan perumahan penduduk miskin di perkotaan. Dilakukannya pembangunan rumah susun seperti ini didasari pertimbangan beberapa hal, yaitu 1) Jarak penduduk ke tempat kerja masih relatif sama dan tidak berubah; 2) Anak-anak yang bersekolah masih pada jarak yang tetap; 3) Hubungan sosial antar penduduk sebagai warga masyarakat tidak berubah, sehingga tidak perlu melakukan adaptasi sosial antar sesama penghuni; 4) Lingkungan menjadi bersih dan sehat dibandingkan sebelumnya; dan 5) Kendaraan roda 4 dapat masuk ke lingkungan mereka, sehingga memudahkan untuk melakukan berbagai kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, bahwa keinginan untuk dapat tinggal di rumah yang sehat merupakan dambaan setiap orang, sehingga hal ini jatuh pada pilihan rumah susun.

SIMPULAN

Kota besar sebagai metropolitan yang ada di Indonesia memiliki banyak permasalahan di antaranya semakin banyak pendatang setiap tahun karena daya tarik kota sendiri; muncul dan semakin padatnya pemukiman kumuh; mereka yang tidak beruntung ada di perkotaan bahkan tidak memiliki tempat tinggal; tempat tinggal yang kumuh miskin berkembang menjadi kumuh kaya walaupun tetap saja sebagai wilayah dengan ciri-ciri yang kumuh menjadi tempat tinggal pilihannya; dan sebagai alternatif penyediaan tempat tinggal murah bagi penduduk miskin perkotaan melalui dibangunnya rumah susun di wilayah bersangkutan. Pembangunan rumah susun tidak lain untuk mengatasi semakin padatnya pemukiman dan menjadikan pemukiman yang sehat sesuai dengan tempat tinggal yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Atidjo. (1984). *Potret Kehidupan Gelandangan : Kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta*. Dalam Widiyanto, Paulus (ed). 1984. *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Bintarto, R. (1984). *Urbanisasi dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, Eko. (1984). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Gilbert, Alan dan Gugler, Josep. (2006). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Penerjemah Anshori, Juanda. Yogyakarta : PT. Tiara wacana.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (ed). (1986). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota. (1976). *Jakarta's Kampung Improvement Program*.
- Suparlan, Parsudi. (1984). *Gelandangan : Sebuah konsekuensi perkembangan kota*. Dalam Widiyanto, Paulus (ed). 1984. *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Temple, Gordon. (1986). *Migrasi ke Jakarta*. Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (ed). 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Widiyanto, Paulus (ed). (1984). *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta : LP3ES.